



Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, DBH, dan PDRB terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

Annida Fitriana Zulafah^{1*}, Agus Arifin¹, Goro Binardjo¹

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

*Corresponding Author: annidafr@gmail.com

Article Information

History of Article:

Received: September 6th
2023

Accepted: September 20th
2023

Published: Oktober 20th
2023

Keywords:

Regional Expenditure,
Capital Expenditure,
Regional Original
Income, Balance Funds,
and Gross Regional
Domestic Product.

Abstract

Regional expenditure carried out by the Regional Government is still of low quality, only 30 percent of the APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) has a direct impact on the public. Regional expenditure is used more for operational expenditure which is generally less productive, while capital expenditure is the least compared to other expenditure, even though their use can be felt directly by the public. The realization of capital expenditure in Central Java Province is still below 30 percent, it has not yet reached the target according to the direction of the Ministry of Home Affairs. The purpose of this study is to analyze the effect of PAD (Pendapatan Asli Daerah), DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus), DBH (Dana Bagi Hasil), and PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) on capital expenditure. The data analysis technique in this study uses panel data regression analysis. The results of this study indicate that: 1) PAD and DBH have a positive effect but not significant on capital expenditure, 2) DAU and DAK have a positive and significant effect on capital expenditure, and 3) PDRB has a negative and significant effect on capital expenditure. The implication of this research is that Regional Government must optimize the extraction of resources that contribute to PAD and DBH. The Regional Government further increase the DAU and DAK budgets allocated to the capital expenditure budget to improve public service. Regional Government can minimize unnecessary routine expenditure, more allocated to capital expenditure in order to improve people's welfare and encourage economic development and community self-sufficiency in a sustainable manner.

Abstrak

History of Article: Diterima: 6 September 2023 Disetujui: September 20th 2023 Dipublikasikan: 20 Oktober 2023	Belanja daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah masih memiliki kualitas yang rendah, hanya 30 persen dari APBD yang berdampak langsung kepada masyarakat. Belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja operasional yang umumnya kurang produktif, sedangkan belanja modal paling sedikit dibandingkan belanja lainnya, padahal penggunaannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Realisasi belanja modal pada provinsi Jawa Tengah masih di bawah 30 persen, belum mencapai target sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dari PAD, DAU, DAK, DBH, dan PDRB terhadap belanja modal. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) PAD dan DBH berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap belanja modal, 2) DAU dan DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, 3) PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal. Implikasi dari penelitian ini adalah Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan penggalan sumberdaya yang memberikan kontribusi terhadap PAD dan DBH. Pemerintah Daerah lebih meningkatkan anggaran DAU dan DAK yang dialokasikan ke anggaran belanja modal untuk meningkatkan pelayanan publik. Pemerintah daerah dapat meminimalisir belanja rutin yang tidak perlu, lebih banyak dialokasikan pada belanja modal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong peningkatan ekonomi dan kemandirian masyarakat secara berkelanjutan.
---	--

© 2023 Universitas Jenderal Soedirman

PENDAHULUAN

Belanja daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah masih memiliki kualitas yang rendah, berdasarkan catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), hanya 30 persen dari APBD yang berdampak langsung kepada masyarakat. APBD tahun 2019 tercatat masih di dominasi oleh belanja pegawai dan belanja barang/jasa dengan proporsi masing-masing sebesar 34,85 persen dan 24,28 persen dari keseluruhan APBD. Adapun belanja modal tercatat hanya sebesar 19,19 persen dari keseluruhan APBD. Belanja pegawai terus mengalami peningkatan terutama di Pulau Jawa, dari Rp82,9 triliun pada 2010 menjadi Rp178,3 triliun pada 2019. Belanja barang/jasa juga mengalami peningkatan karena meningkatnya belanja perjalanan dinas, honorarium, dan rapat. Di satu sisi, belanja modal mengalami penurunan akibat gagal lelang dan permasalahan lahan. Sebagian belanja modal juga digunakan untuk membangun gedung dan membeli kendaraan dinas.

Belanja daerah yang telah dialokasikan oleh Pemerintah Daerah harus mencapai hasil yang diinginkan dan mencapai sasaran kebijakan yang telah ditetapkan baik secara efektif

maupun efisien. Untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah khususnya dalam penggunaan belanja operasional dan belanja modal dapat diketahui melalui perhitungan rasio keserasian yang merupakan salah satu cara untuk mengukur kinerja keuangan daerah. Rasio keserasian menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasional dan belanja pembangunan (belanja modal) secara optimal (Fathah, 2017).

Tabel 1. Perhitungan Rasio Keserasian pada 6 Provinsi di Pulau Jawa
Tahun Anggaran 2017-2022 (dalam miliar rupiah)

Provinsi	Belanja Operasional	Belanja Modal	Total Belanja Daerah	Rasio Belanja Operasional (%)	Rasio Belanja Modal (%)
Jawa Barat	510.056,64	100.427,67	751.700,85	67.85	13.36
Jawa Tengah	410.172,58	81.659,23	615.993,72	66.59	13.26
Jawa Timur	503.711,72	107.052,89	736.650,19	68.38	14.53
Banten	142.134,95	36.325,23	208.159,43	68.28	17.45
DKI Jakarta	298.445,37	55.167,08	354.202,57	84.26	15.58
DI Yogyakarta	63.982,23	14.977,70	91.663,60	69.80	16.34

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2022

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Daerah masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasional sehingga rasio belanja modal relatif kecil. Provinsi Jawa Tengah memiliki rasio belanja modal dan rasio belanja operasional yang terendah dibandingkan dengan provinsi lainnya. Belanja modal yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah didasarkan pada kebutuhan akan sarana dan prasarana untuk memperlancar penyelenggaraan kegiatan maupun tugas Pemerintah Daerah serta menyediakan berbagai fasilitas publik yang dibutuhkan masyarakat. Realisasi belanja daerah di provinsi Jawa Tengah lebih banyak difokuskan untuk belanja rutin seperti belanja pegawai dan operasional yang umumnya kurang produktif.

Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) mendorong Pemerintah Daerah agar meningkatkan proporsi pengalokasian belanja modal mencapai 30 persen sampai 40 persen dari total belanja daerah, karena penggunaan belanja modal akan dirasakan langsung oleh masyarakat (Sumber: www.beritasatu.com). Realisasi belanja modal pada Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 belum mencapai target sesuai arahan Kemdagri, realisasi belanja modal masih berada di bawah 30 persen pada semua kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

METODE ANALISIS

1. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan objek penelitian yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Belanja Modal. Penelitian ini dilakukan pada 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah dengan periode penelitian selama 5 tahun dari 2017-2021. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan. Data yang akan dianalisis dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari

internet dengan mengakses *website* resmi Badan Pusat Statistik Jawa Tengah dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu belanja modal yang diukur melalui jumlah pengeluaran modal yang dilakukan oleh setiap kabupaten/kota di Jawa Tengah dalam satuan rupiah. Variabel independen terdiri dari PAD yang diukur melalui jumlah pendapatan yang diterima berdasarkan pengelolaan sumberdaya yang ada pada setiap kabupaten/kota di Jawa Tengah dalam satuan rupiah, DAU diukur melalui jumlah TKDD yang diterima berdasarkan persentase tertentu oleh setiap kabupaten/kota di Jawa Tengah dalam satuan rupiah, DAK diukur melalui jumlah TKDD yang diterima oleh setiap kabupaten/kota di Jawa Tengah yang telah memenuhi kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis dalam satuan rupiah. DBH diukur melalui jumlah TKDD yang diterima berdasarkan persentase tertentu dari DBH Pajak dan SDA oleh setiap kabupaten/kota di Jawa Tengah dalam satuan rupiah, dan PDRB diukur melalui jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan dari seluruh unit ekonomi pada setiap kabupaten/kota di Jawa Tengah dalam satuan rupiah.

2. Teknik Analisis Data

a. Analisis Regresi Data Panel

Analisis regresi data panel merupakan regresi yang menggabungkan data *time series* dengan data *cross section*, digunakan untuk menganalisis pengaruh PAD, DAU, DAK, DBH, dan PDRB terhadap belanja modal. Terdapat tiga model pendekatan dalam mengestimasi regresi data panel yaitu, *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Rumus fungsi analisis regresi data panel sebagai berikut:

$$LnBM_{it} = \beta_0 + \beta_1 LnPAD_{it} + \beta_2 LnDAU_{it} + \beta_3 LnDAK_{it} + \beta_4 LnDBH_{it} + \beta_5 LnPDRB_{it} + e_{it} \quad (1)$$

Keterangan:

BM	= Belanja Modal
β_0	= Koefisien Intersep
β_{1-5}	= Koefisien Regresi
PAD	= Pendapatan Asli Daerah
DAU	= Dana Alokasi Umum
DAK	= Dana Alokasi Khusus
DBH	= Dana Bagi Hasil
PDRB	= Produk Domestik Regional Bruto (dalam satuan rupiah)
i	= Wilayah Penelitian
t	= Rentang Waktu Penelitian
e	= Error Term

b. Pemilihan Model Regresi Data Panel

Ada tiga pengujian yang dilakukan untuk memilih model terbaik yang akan digunakan dalam penelitian, yaitu:

1) Uji Chow

Uji Chow dilakukan untuk memilih model mana yang terbaik antara CEM dan FEM. Apabila nilai probabilitas *cross-section* $F > 0,05$ maka model yang terpilih adalah CEM. Apabila nilai probabilitas *cross-section* $F < 0,05$ maka model yang terpilih adalah FEM.

2) Uji Hausman

Uji Hausman dilakukan untuk memilih model mana yang terbaik antara FEM dan REM. Apabila nilai probabilitas *cross-section* $F > 0,05$ maka model yang terpilih adalah REM. Apabila nilai probabilitas *cross-section* $F < 0,05$ maka model yang terpilih adalah FEM.

3) Uji *Langrange Multiplier* (LM)

Uji *Langrange Multiplier* (LM) digunakan untuk memilih model mana yang terbaik antara CEM dan REM. Apabila nilai probabilitas *cross-section* $F > 0,05$ maka model yang terpilih adalah CEM. Apabila nilai probabilitas *cross-section* $F < 0,05$ maka model yang terpilih adalah REM.

c. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji *Jarque - Bera Test*, dengan kriteria sebagai berikut:

- Apabila nilai prob. JB $> 0,05$ maka nilai residual terdistribusi dengan normal.
- Apabila nilai prob. JB $< 0,05$ maka nilai residual tidak terdistribusi dengan normal.

2) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dapat diketahui melalui nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *Tolerance*. Apabila nilai VIF kurang dari 10 dan nilai toleransi lebih dari 0,10 maka dapat dikatakan tidak terjadi masalah multikolinieritas

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji Glejser, dengan kriteria sebagai berikut:

- Apabila nilai probabilitas $> 0,05$ maka tidak ada masalah heteroskedastisitas.
- Apabila nilai probabilitas $< 0,05$ maka ada masalah heteroskedastisitas.

d. Uji Statistik

1) Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi menunjukkan seberapa jauh model dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai R^2 berkisar antara nol sampai dengan satu.

2) Uji F

Uji F menunjukkan pengaruh secara bersama-sama dari semua variabel independen yang dimasukan dalam model terhadap variabel dependen. Apabila nilai prob. *F-statistic* $< 0,05$ maka variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3) Uji t

Uji t menunjukkan seberapa besar pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen dengan mengasumsikan variabel independen lainnya konstan. Apabila nilai prob. *t-statistic* $< 0,05$ maka variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Regresi Data Panel

Setelah dilakukan pemilihan model estimasi menggunakan Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji *Langrange Multiplier* (LM) terpilih *Fixed Effect Model* (FEM) yang paling tepat dalam penelitian ini. Hasil estimasi dari *Fixed Effect Model* (FEM) adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Hasil Estimasi *Fixed Effect Model*

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistik	Prob.
C	-35.03336	18.35384	-1.908776	0.0584
PAD	0.030344	0.155602	0.19501	0.8457
DAU	4.310297	0.585438	7.362514	0.0000
DAK	0.677283	0.181637	3.728775	0.0003
DBH	0.220926	0.12425	1.77807	0.0776
PDRB	-2.184261	0.392927	-5.558951	0.0000
<i>R-squared</i>	0.861068			
<i>Adjusted R-squared</i>	0.820932			
<i>F-statistic</i>	21.4538			
<i>Prob(F-statistic)</i>	0.00000			
<i>Durbin-Watson stat</i>	2.228775			

Sumber: Hasil Pengolahan *E-Views* 10

Berdasarkan hasil estimasi regresi data panel, maka persamaan regresi dapat disusun sebagai berikut:

$$\widehat{LnBM} = -35,03 + 0,03LnPAD + 4,31LnDAU + 0,67LnDAK + 0,22LnDBH - 2,18LnPDRB \quad (2)$$

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas

Pengujian	Nilai
Jarque-Bera	3.671014
Probabilitas	0.159533

Sumber: Hasil Pengolahan *E-Views*10

Tabel 3 menunjukkan nilai probabilitas *Jarque-Bera* sebesar $0.159533 > 0.05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual dalam penelitian ini berdistribusi normal atau tidak terdapat permasalahan normalitas.

b. Uji Multikolinieritas

Tabel 4 Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Toleransi	VIF
PAD	0.278	3.599
DAU	0.131	7.618
DAK	0.163	6.118
DBH	0.448	2.234
PDRB	0.160	6.244

Sumber: Hasil Pengolahan *SPSS*

Tabel 4 menunjukkan nilai VIF kurang dari 10 dan nilai *Tolerance* lebih dari 0,10, artinya tidak terjadi masalah multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5 Hasil Uji Hetereskedastisitas

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistik	Prob.
C	-0.0038	0.5266	-0.0073	0.9942
PAD	-0.0012	0.0200	-0.0617	0.9509
DAU	0.0412	0.0574	0.7174	0.4741
DAK	-0.0570	0.0349	-1.6343	0.1040
DBH	0.0129	0.0137	0.9469	0.3451
PDRB	0.0057	0.0186	0.3048	0.7609

Sumber: Hasil Pengolahan E-Views 10

Tabel 5 menunjukkan nilai probabilitas masing-masing variabel lebih dari 0.05, artinya dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

3. Uji Statistik

a. Koefisien Determinasi

Tabel 2 menunjukkan nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0.820932 atau 82 persen, artinya variabel independen yaitu PAD, DAU, DAK, DBH, dan PDRB mampu menjelaskan variasi dari variabel dependen yaitu Belanja Modal sebesar 82 persen sedangkan 18 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian.

b. Uji F

Tabel 2 menunjukkan nilai *F-statistic* sebesar 21.45380 lebih besar dari F-tabel yaitu 2.27 dan nilai propabilitas *F-statistic* sebesar $0.000000 < 0.05$, sehingga dapat disimpulkan variabel PAD, DAU, DAK, DBH, dan PDRB secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

c. Uji t

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, sebagai berikut:

- Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Nilai probabilitas *t-statistic* variabel PAD sebesar $0.8457 > 0.05$ dengan koefisien sebesar 0.030344, sehingga H_1 ditolak dan H_0 diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel PAD berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap belanja modal.
- Dana Alokasi Umum (DAU)
Nilai probabilitas *t-statistic* variabel DAU sebesar $0.0000 < 0.05$ dengan koefisien sebesar 4.310297, sehingga H_1 diterima dan H_0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa variabel DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.
- Dana Alokasi Khusus
Nilai probabilitas *t-statistic* variabel DAK sebesar $0.0003 < 0.05$ dengan koefisien sebesar 0.677283, sehingga H_1 diterima dan H_0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa variabel DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.
- Dana Bagi Hasil (DBH)
Nilai probabilitas *t-statistic* variabel DBH sebesar $0.0776 > 0.05$ dengan koefisien sebesar 0.220926, sehingga H_1 ditolak dan H_0 diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel DBH berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap belanja modal
- Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Nilai probabilitas *t-statistic* variabel PDRB sebesar $0.0000 < 0.05$ dengan koefisien - 2.184261 sehingga H_1 ditolak dan H_0 diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal.

4. Pembahasan

a. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal

Hasil pengujian dari penelitian ini menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wandira (2013) dan Lutpikah & Mahendra (2020) yang memberikan hasil penelitian yang sama yaitu PAD berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja modal. Lutpikah & Mahendra (2020) mengatakan bahwa PAD yang didapat dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah masih relatif kecil sehingga PAD tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. Menurut Wandira (2013), daerah dengan PAD rendah kemungkinan dikarenakan kurangnya penggalian sumber-sumber baru, seharusnya setiap daerah dapat meningkatkan PAD melalui peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat. Pengaruh lain kemungkinan bisa disebabkan karena PAD sebagian besar dibelanjakan untuk membiayai belanja lain, seperti belanja pegawai, belanja rutin atau belanja operasional. PAD yang dihasilkan oleh provinsi Jawa Tengah dari tahun 2017-2021 masih relatif kecil dibandingkan dengan pendapatan daerah lainnya, sebagian besar pendapatan daerah didapatkan dari transfer pemerintah pusat dan pendapatan lainnya. Oleh karena itu, PAD yang dialokasikan untuk belanja modal juga relatif kecil, sehingga PAD tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal.

b. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal

Hasil pengujian dari penelitian ini menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hermawan dkk. (2021), Suryatinigrum dkk. (2020), dan Sulistyaningsih & Haryanto (2019) yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hermawan dkk. (2020) mengatakan bahwa peningkatan DAU akan berkontribusi besar terhadap peningkatan belanja modal. DAU yang bukan bersumber dari PAD dan merupakan bagian dari dana transfer pusat selain DAK dan DBH apabila semakin besar alokasinya maka alokasi belanja modal akan semakin besar pula, begitu juga sebaliknya. DAU merupakan salah satu sumber pendanaan yang memiliki kontribusi cukup signifikan terhadap pendapatan daerah sehingga pemerintah daerah dapat menggunakannya untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. DAU yang didapatkan oleh provinsi Jawa Tengah mencapai 52-57 persen dari total TKDD. Oleh karena itu, DAU yang dialokasikan untuk belanja modal juga relatif besar, sehingga DAU memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal.

c. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal

Hasil pengujian dari penelitian ini menunjukkan bahwa DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hermawan dkk. (2021), Dewi (2019), dan Sulistyaningsih & Haryanto (2019) yang menyatakan bahwa DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Dewi (2019) mengatakan bahwa semakin tinggi DAK yang diterima oleh pemerintah daerah maka semakin besar pula belanja modal yang dapat dialokasikan ke daerah tersebut. DAK yang didapatkan oleh provinsi Jawa Tengah mencapai 26-28 persen dari total TKDD, jumlahnya relatif besar jika dibandingkan dengan DBH. DAK juga digunakan untuk membiayai kegiatan atau proyek khusus yang ada di daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, seperti memperbaiki jalan yang rusak, membangun jembatan dan infrastruktur lainnya yang di anggarkan dalam belanja modal. Oleh karena itu, DAK yang dialokasikan untuk belanja modal juga relatif besar, sehingga DAK memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal.

d. Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal

Hasil pengujian dari penelitian ini menunjukkan bahwa DBH berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fathia & Rusdi (2020) dan Rifai (2017) yang memberikan hasil penelitian yang sama yaitu DBH berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja modal. Fathia & Rusdi (2020) mengatakan bahwa DBH termasuk pendapatan dengan jumlah yang sangat kecil dibandingkan dengan pendapatan daerah yang lainnya, sehingga DBH tidak terlalu diperhatikan oleh pemerintah setempat sebagai faktor yang mempengaruhi besarnya nilai belanja modal. DBH yang didapatkan oleh provinsi Jawa Tengah dari tahun 2017-2021 masih relatif kecil, sebagian besar didapatkan dari transfer pemerintah pusat lainnya, yaitu DAU, DAK dan pendapatan lainnya. Oleh karena itu, DBH yang dialokasikan untuk belanja modal juga relatif kecil, sehingga DBH tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal.

e. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Belanja Modal

Hasil pengujian dari penelitian ini menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal. Berdasarkan Hukum Wagner, apabila PDRB meningkat maka pengeluaran pemerintah juga akan meningkat, namun hasil penelitian ini menunjukkan hubungan yang negatif, yaitu apabila PDRB meningkat justru diikuti dengan penurunan belanja modal. Penelitian yang dilakukan oleh Azwar (2016) menyatakan bahwa dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah. Belanja modal termasuk dalam belanja barang/jasa pemerintah yang memiliki masa manfaat relatif panjang. Menurut Azwar (2016), investasi aset khususnya dalam bentuk infrastruktur memiliki masa manfaat panjang, sehingga dalam jangka panjang pengeluaran untuk investasi aset yang baru tidak lagi diperlukan karena pengeluaran hanya dilakukan untuk pemeliharaan dan pembelian peralatan yang nilainya jauh lebih kecil daripada investasi aset di awal. Oleh karena itu, meningkatnya PDRB justru diikuti dengan penurunan belanja modal. Alasan lain yang dapat terjadi yaitu adanya ketidakserasian dalam alokasi belanja daerah. Meningkatnya PDRB diikuti dengan meningkatnya pengeluaran daerah namun pada sisi belanja operasional, sedangkan belanja modal menjadi turun, dengan kata lain apabila PDRB meningkat maka akan menurunkan belanja modal karena meningkatnya alokasi untuk belanja operasional.

f. Pengaruh PAD, DAU, DAK, DBH, dan PDRB terhadap Belanja Modal

Hasil pengujian dari penelitian ini menunjukkan bahwa PAD, DAU, DAK, DBH dan PDRB secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2017-2021. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fathia & Rusdi (2020) yang menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, DBH, dan PAD secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel PAD, DAU, DAK, DBH dan PDRB mampu menjelaskan variasi variabel belanja modal sebesar 82 persen, sedangkan sisanya 18 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. Variabel lainnya dapat berupa variabel Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), berdasarkan penelitian yang dilakukan Farel (2015), variabel SiLPA memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada Kabupaten Bogor tahun 2003-2013.

KESIMPULAN

1. PAD berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan PAD tidak selalu diikuti dengan meningkatnya belanja modal

pada kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2021. Melihat adanya pengaruh yang tidak signifikan dari PAD terhadap belanja modal, maka pemerintah daerah harus mengoptimalkan penggalan sumberdaya yang memberikan kontribusi terhadap PAD. Hal ini bisa dilakukan dengan cara intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak, meningkatkan efektivitas pemungutan pajak atau retribusi daerah dengan peningkatan efisiensi sistem pemungutan maupun pengelolaan pajak atau retribusi daerah.

2. DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya DAU maka akan diikuti dengan meningkatnya belanja modal pada kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2021.
3. DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya DAK maka akan diikuti dengan meningkatnya belanja modal pada kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2021.
4. Melihat adanya pengaruh yang signifikan dari DAU dan DAK terhadap belanja modal, maka pemerintah daerah sebaiknya lebih meningkatkan anggaran DAU dan DAK yang dialokasikan ke anggaran belanja modal, untuk membiayai pengeluaran pemerintah khususnya dalam hal peningkatan pelayanan publik.
5. DBH berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan DBH tidak selalu diikuti dengan meningkatnya belanja modal pada kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2021. Melihat adanya pengaruh yang tidak signifikan dari DBH terhadap belanja modal, maka pemerintah daerah harus mengoptimalkan penggalan sumber penerimaan yang dihasilkan dari DBH Pajak dan SDA, terutama penerimaan dari cukai hasil tembakau yang memiliki kontribusi cukup besar. Hal ini dapat dilakukan dengan perbaikan mekanisme pelayanan dan pengawasan untuk mencapai target penerimaan DBH yang lebih besar.
6. PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya PDRB maka akan menurunkan belanja modal pada kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2021. Melihat adanya pengaruh yang signifikan dari PDRB terhadap belanja modal, maka pemerintah daerah sebaiknya lebih banyak mengalokasikan pendapatan daerah dalam bentuk belanja modal guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta meminimalisir belanja rutin yang tidak perlu. Pengeluaran pemerintah daerah, khususnya belanja modal harus lebih difokuskan pada sektor-sektor yang mampu mendorong peningkatan ekonomi dan kemandirian masyarakat secara berkelanjutan.
7. PAD, DAU, DAK, DBH, dan PDRB secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2021. Variabel PAD, DAU, DAK, DBH, dan PDRB secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel belanja modal sebesar 82 persen sedangkan sisanya 18 persen dipengaruhi oleh variabel lain.

DAFTAR PUSTAKA

Anita Sri, W., & Rahmat, Y. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta. S1 Akuntansi.

- Astuti, S. B., Santoso, S. F., & Bantasyam, S. (2021). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019). *JlAP: Jurnal Ilmiah Akuntansi Pancasila*, 1(2), 94-105.
- Azwar, A. (2016). Peran Alokatif Pemerintah Melalui Pengadaan Barang/Jasa dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, 20(2), 149-167.
- Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. (2022). Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2022, di akses pada 8 Juni 2023, dari <https://jateng.bps.go.id/publication/2022/02/25/431f4f4bbe02b47866b357cc/provinsi-jawa-tengah-dalam-angka-2022/>
- Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. (2022). PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, di akses pada 30 Januari 2023, dari <https://jateng.bps.go.id/indicator/157/1741/1/-seri-2010-pdrb-atas-dasar-harga-konstan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah/>
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2015). *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers
- Beritasatu.com. (2021). *Kemdagri Minta Pemda Tingkatkan Alokasi Belanja Modal*, di akses pada 30 Januari 2023, dari <https://www.google.com/amp/s/www.beritasatu.com/amp/ekonomi/769737/kemdagri-minta-pemda-tingkatkan-alokasi-belanja-modal/>
- Bisnis.com. (2019). *Sri Mulyani : Hanya 30 Persen dari APBD yang berdampak kepada Rakyat*, di akses pada 30 Januari 2023, dari <https://m.bisnis.com/amp/read/20191114/10/1170404/sri-mulyani-hanya-30-persen-dari-apbd-yang-berdampak-kepada-rakyat/>
- Dewi, E. P. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2012-2017. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humanoria*, 1(04), 8-26.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2022). *Postur APBD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah*. Di akses 11 November 2022, dari <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd/>
- Fadillah, R. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Online Mahasiswa*, 4(2).
- Fadly, F. (2016). Adakah Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah?. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 16(2).
- Farel, R. (2015). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal di Kabupaten Bogor. Signifikan: *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 4(2).
- Fathah, R. N. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Ebbank*, 8(1), 33-48.
- Fathia, P. B., & Rusdi, D. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

- (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah 2015-2018). *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Ekonomi*.
- Fitriana, N., & Sudarti, S. (2018). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Jumlah Penduduk terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 2(2), 332-345.
- Ghozali, I. (2017). *Ekonometrika Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan IBM SPSS 24*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hartati, H. D. (2013). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal di Kota Balikpapan. *Journal of Innovation in Business and Economics*, 4(2), 115-130.
- Hermawan, P. Y., Tiawon, H., & Neneng, S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Kalimantan Tengah. *Journal of Environment and Management*, 2(3), 242-248
- Huda, S., & Sumiati, A. (2019). Pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 14(1), 85-100.
- Ismanto, H., & Pebruary, S. (2021). *Aplikasi SPSS dan Eviews Dalam Analisis Data Penelitian*. Sleman: Deepublish
- Jayanti, F. D. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2016-2018. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 8(3).
- Juniawan, M. A., & Suryantini, N. P. S. (2018). Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Belanja Modal Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Bali (*Doctoral dissertation*, Udayana University).
- Lutpikah, N. W., & Mahendra, D. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Karanganyar Tahun 2017-2019. *AKTUAL*, 5(2), 147-158.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mursyidi. (2018). *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung
- Nurzen, M., & Riharjo, I. B. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(4).
- Permatasari, I., & Mildawati, T. (2016). Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(1).
- Prasetya, I. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Belanja Pegawai Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi di Indonesia). *Jurnal Akuntansi*, 5(2).
- Purwanto, D. (2015). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum, Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Realisasi Belanja Modal. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 11(2).

- Rifai, R. A. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah. *Katalogis*, 5(7).
- Rizal, Y. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Kota Langsa. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 3(1), 74-83.
- Siregar, B. (2017). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Siwu, H. F. D. (2019). Strategi Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 18(6).
- Sulistyaningsih, I., & Haryanto, H. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(2).
- Suliyanto. (2018). *Metode Penelitian Bisnis Untuk Skripsi, Tesis Dan Disertasi*. Yogyakarta: Andi Offset
- Supardan, Herry. 2020. *Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah*. Malang: Media Nusa Creative
- Suparyanto, Yudi. (2019). *Otonomi Daerah Dalam Kerangka NKRI*. Klaten: Cempaka Putih
- Suryatinigrum, I., Indarti, I., & Adnanti, W. A. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal dengan Pendapatan Per Kapita sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ilmiah Aset*, 22(2), 131-146.
- Susanti, S., & Fahlevi, H. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal (studi pada kabupaten/kota di wilayah Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 1(1), 183-191.
- Utomo, M. A. F., & Adi, S. W. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Belanja Modal (Studi Empiris Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017) (*Doctoral dissertation*, Universitas Muhammadiyah Surakarta)
- Wandira, A. G. (2013). Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap pengalokasian belanja modal. *Accounting Analysis Journal*, 2(1).
- Waskito, W., Zuhrotun, Z., & Rusherlisyani, R. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten & Pemerintah Kota di Provinsi Aceh). *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 3(2), 220-238.
- Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta